SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Serah Terima Jabatan
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah

Semarang**, Kamis (26 Februari 2015) –** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah antara pejabat lama **Dr. Cris Kuntadi, SE., MM., CPA., QIA., CA., Ak.** dengan pejabat baru **Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.I.A., C.F.E.** Acara ini disaksikan oleh Anggota V BPK **Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A.,** Anggota III BPK **Prof. Eddy Mulyadi Supardi, S.E., Ak., M.M., CFr.A., C.A.,** Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK **Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak,** dan Tortama KN III BPK **Dr. Rochmadi Saptogiri S.E., M.M., Ak.**

Bapak **Cris Kuntadi** telah bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah sejak 23 Juli 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atau kurang lebih selama enam bulan. Saat ini beliau telah menempati jabatan sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Perhubungan. Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah digantikan oleh Bapak **Hery Subowo** yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat III.A. Auditorat Utama Keuangan Negara III yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, Mensesneg, Sekretariat Kabinet, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, TMII, Kemenpan dan RB, BKN, Arsip Nasional, BPKP, LAN, Perpustakaan nasional, Ombudsman RI serta lembaga terkait di lingkungan entitas. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal tata kelola keuangan daerah dan pembangunan yang lebih baik di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang ditandai dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2013 untuk sebelas Pemerintah Daerah, dan 25 Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibandingkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2008 sebanyak 36 Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Tengah seluruhnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. Untuk itu diharapkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti. Tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dicerminkan pula dari seberapa jauh rekomendasi hasil pemeriksaan telah diselesaikan. Anggota V BPK berharap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, sesuai harapan masyarakat.

Acara dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh Anggota V BPK, Anggota III BPK, Tortama KN V, Tortama KN III, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Formpimda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Rektor UIN Provinsi Jawa Tengah, Kepala OJK Regional 4 Jawa Tengah dan DIY, Direktur Operasional PT BPD Jateng, Staf Ahli Gubernur Akmil, Wakil CEO PT BNI 46 serta Ketua IAI Wilayah Jawa Tengah.

Informasi lebih lanjut: *Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*
Telepon : 024-8660825,8660826; Fax : 024-8660884
Website: semarang.bpk.go.id